
STUDI EVALUATIF KEBIJAKAN BELANJA PENDIDIKAN; BUKTI EMPIRIS DARI DAERAH DENGAN TINGKAT KEMISKINAN TINGGI

Oleh

Mesri Welhelmina Nisriani Manafe

Universitas Kristen Artha Wacana

Email: mesrimanafe@gmail.com

Article History:

Received: 05-08-2021

Revised: 15-09-2021

Accepted: 27-09-2021

Keywords:

Evaluasi Kebijakan Fiskal,
Kesejahteraan Masyarakat,
Kemiskinan Tinggi, Alokasi
Belanja Pendidikan

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan fiskal daerah melalui belanja pendidikan untuk mendorong pertumbuhan kesejahteraan masyarakat pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Penelitian dilakukan di Provinsi NTT dengan Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai daerah pembanding. Analisis deskriptif dilakukan terhadap RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023, Data kemiskina dan IPM serta indikator-indikator capaian kesejahteraan yang berhubungan dengan pendidikan untuk tahun 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah NTT telah menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan pembangunannya sesuai RPJMD dan RPJP tetapi ada indikasi lemahnya pengendalian kebijakan fiskal dalam alokasi belanja pendidikan yang cenderung statis meskipun dengan alokasi yang besar dari total penerimaan daerah. Rendahnya tingkat pertumbuhan belanja pendidikan berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa pemerintah belum cukup baik melakukan pengendalian kebijakan fiskal daerah. Hasil perbandingan menunjukkan Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami permasalahan dalam hal pengukuran kinerja value for money yang menimbulkan rendahnya tingkat efisiensi penggunaan anggaran

PENDAHULUAN

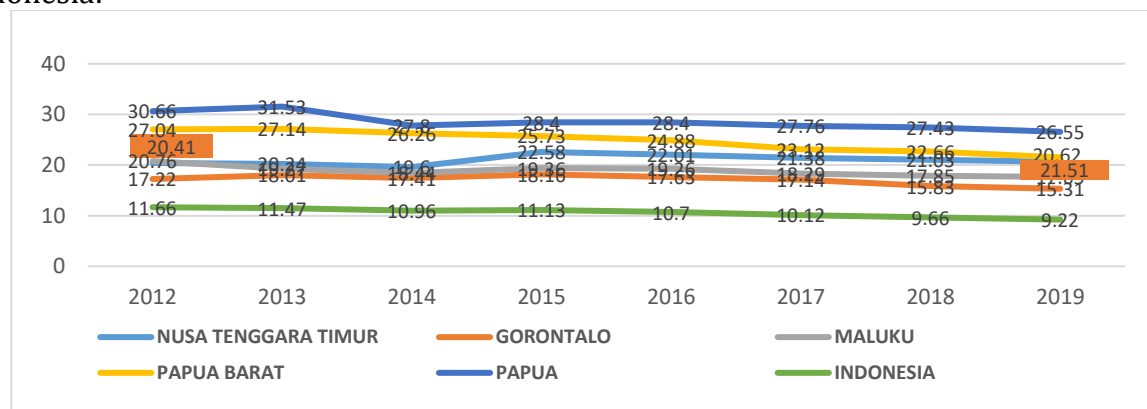
Desentralisasi fiskal membawa perubahan besar terhadap pengelolaan daerah karena memberikan ruang yang besar bagi daerah untuk mengurus dirinya sendiri. Konsep ini mengandung maksud bahwa selain kemandirian dalam hal pengelolaan tetapi juga ada tanggungjawab yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Daerah dituntut untuk mampu untuk menyusun kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakatnya. Kebijakan daerah yang berpihak kepada peningkatan kesejahteraan tercermin dalam kebijakan fiskal daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).[1] menyatakan bahwa

desentralisasi fiskal berperan penting dalam mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena desentralisasi fiskal menempatkan daerah dalam pengambilan keputusan penganggaran berdasarkan potensi yang dimiliki.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [2] dan [3] yang menyatakan bahwa kondisi fiskal *health* dan pengendalian kebijakan daerah yang baik akan mendorong pengeluaran yang sejalan dengan visi dan misi daerah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pengeluaran yang bersifat mandatori, diantaranya adalah pengeluaran sektor pendidikan. Pengeluaran sektor pendidikan untuk setiap daerah bersumber dari pendapatan asli daerah yang diperoleh karena pemanfaatan sumber daya daerah dan pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat melalui dana transfer. Pengeluaran atau belanja pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran belanja fungsi lainnya berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan yang diproksikan melalui pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia ([4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]).

Secara umum hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa belanja daerah berperan penting sebagai alat pengendalian kebijakan daerah yang langsung berhubungan dengan sektor pendidikan dan sektor-sektor potensial lain dan berdampak besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mereka dapat bekerja, memperoleh pendapatan agar dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan [15].

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu daerah yang mendapat perhatian besar sejak berjalannya desentralisasi fiskal. [3] dan [2] melakukan penelitian pada level pemerintah daerah di NTT, menyatakan bahwa ada kecenderungan lemahnya kemampuan daerah dalam menetapkan program dan kegiatan yang sejalan dengan kebutuhan daerah untuk peningkatan kualitas sektor-sektor potensial. NTT merupakan daerah dengan rata-rata pengurangan angka kemiskinan terendah mencapai -0,21% lebih rendah dibandingkan Papua dan Papua Barat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Berikut ini diberikan gambaran kondisi kemiskinan NTT dibandingkan 4 daerah lainnya di Indonesia:



Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Penduduk Miskin 5 Provinsi dan Indonesia Tahun 2012-2019

Sumber: BPS, 2021 (<https://www.bps.go.id>)

Gambaran di atas menunjukkan pergerakan pengurangan angka kemiskinan di NTT belum bahkan tidak berjalan dengan baik. Selama hampir satu dekade NTT hanya mencapai rata-rata pertumbuhan -0.21% berbanding terbalik dengan pendapatan dan belanja daerah untuk sektor potensial yang terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam pengelolaan APBD cenderung belum menempatkan belanja-belanja daerah untuk program prioritas pembangunan termasuk peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu cara untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pengurangan angka kemiskinan di NTT.

Program-program prioritas pembangunan daerah tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD menggambarkan secara utuh kebijakan sesuai kebutuhan daerah yang nampak dalam implementasi visi dan misi serta anggaran yang melekat pada setiap program dan kegiatan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini mendapatkan urgensi yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan daerah dalam hal pengeluaran belanja pendidikan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui pengurangan angka kemiskinan, peningkatan IPM maupun indikator-indikator kualitas pendidikan yang akan digambarkan lebih rinci pada bagian berikut.

Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan anggaran, secara khusus untuk belanja pendidikan. Apakah program dan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari belanja pendidikan telah mencapai sasarannya melalui indikator-indikator kesejahteraan ataukah kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD tidak sejalan dengan program dan kegiatannya sehingga anggaran pendidikan tidak mencapai hasil yang diharapkan dan hanya sekedar pemenuhan target amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan memenuhi kewajiban penggunaan dana transfer pusat.

LANDASAN TEORI

Teori Pengeluaran Pemerintah *Keynes*

Teori yang melandasi pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini adalah Teori Keynes. Teori ini bersimpulan bahwa pengeluaran pemerintah berperan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat, karena menciptakan ruang untuk penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Negara berkembang dan negara miskin sangat bergantung terhadap pengeluaran pemerintah untuk memperbaiki kualitas manusianya. Hasil ini sejalan dengan [16] yang menyatakan bahwa peningkatan output dan penyerapan tenaga kerja merupakan dampak dari pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan Teori Keynesian dapat disimpulkan bahwa bagi negara berkembang seperti Indonesia dan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Provinsi NTT diperlukan intervensi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Konteks Indonesia sebagai negara dan NTT sebagai pemerintah daerah harus berperan untuk menciptakan keseimbangan dan peningkatan kehidupan masyarakat. Secara nyata peran dan dukungan pemerintah tampak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Perundangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Alokasi Belanja Pendidikan Daerah.

Menurut [17] yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD berdasarkan pendekatan kinerja terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan yang tertuang dalam Undang-Undang No 33 tahun 2004 [18]. Komponen anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan merupakan bentuk kebijakan fiskal daerah secara umum, sedangkan rencana penggunaan anggaran dalam bentuk program dan kegiatan daerah, realisasi penggunaan dan capaian hasil atau kinerja secara utuh tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP). Analisis LAKIP dapat dilakukan dengan melihat kesesuaiannya pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat perencanaan, hasil dan capaian dalam tiap tahun anggaran pada suatu daerah baik pada level kabupaten maupun provinsi. Kebijakan daerah dalam penggunaan anggaran untuk belanja kesejahteraan masyarakat melalui komponen belanja pendidikan harus mendapat perhatian besar, karena telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [19], menyatakan bahwa "Anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD". Meskipun telah diamanatkan oleh konstitusi dalam pelaksanaannya tidak semua daerah mematuhi ketentuan tersebut.

Sumber Belanja Pemerintah untuk Sektor Pendidikan dan Perhitungan Anggaran Urusan Pendidikan

Sumber-sumber belanja pemerintah daerah untuk sektor pendidikan adalah sebagai berikut: Dana Daerah yaitu anggaran pendidikan menurut urusan pendidikan di luar transfer daerah., Transfer Daerah yaitu anggaran pendidikan yang berasal dari APBN, Anggaran Non Urusan Pendidikan yaitu anggaran pendidikan yang terdapat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain., Rincian Dana Transfer Daerah Bidang Pendidikan di kabupaten/kota yang terdiri dari: DAK Fisik, TPG, Tamsil, TKG, DAU (Gaji GTK PNSD), BOP PAUD, Rincian Dana Transfer Daerah Bidang Pendidikan di provinsi yang terdiri dari : DAK Fisik, TPG, Tamsil, TKG, DAU (Gaji GTK PNSD), BOS, Alokasi Anggaran Bantuan Pemerintah (bersumber dari APBN) di provinsi, meliputi bantuan untuk: SMA, SMK, dan PKLK, Alokasi Anggaran Bantuan Pemerintah (bersumber dari APBN) di kabupaten/kota, meliputi bantuan untuk: PAUD-DIKMAS, SD, SMP, GTK, dan Kebudayaan.

Perhitungan anggaran urusan pendidikan di level daerah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebesar 20% dengan menggunakan indikator pendapatan transfer dan non transfer sebagai berikut: Anggaran urusan pemerintah dengan transfer daerah adalah total dari seluruh anggaran pendidikan daerah dengan pembagiannya anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan untuk anggaran urusan pendidikan di luar transfer daerah tidak memperhitungkan transfer daerah melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun

hasil penelitian. Metode deskriptif menurut Sugiyono (2012) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Populasi dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTT. Data indikator kesejahteraan yang berhubungan dengan pendidikan adalah data IPM NTT beserta indikator inputnya, Kemiskinan NTT dan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Provinsi NTT. Berdasarkan populasi, maka sampel dalam penelitian ini adalah RPJMD Provinsi NTT periode 2018-2023, IPM NTT tahun 2018-2020 beserta indikator inputnya, Prosentase Kemiskinan dan Alokasi Anggaran Belanja Pendidikan Provinsi NTT tahun 2018-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Daerah mengenai Kesejahteraan Masyarakat dan Belanja Pendidikan di NTT.

RPJMD NTT 2018-2023 merupakan tahapan keempat atau periode terakhir RPJPD NTT 2005-2025. Semangat dalam RPJMD 2018-2023, yaitu berorientasi kuat pada restorasi masyarakat untuk menciptakan lompatan besar (*great leap*), mengingat posisi NTT saat ini berada di urutan terbelakang dalam berbagai indikator kunci pembangunan, terutama kemiskinan dan derajat kualitas manusia (RPJMD Provinsi NTT; Bab 1. Hal.3; Bab 4. Hal 1). Sektor pendidikan menjadi bagian dalam urusan wajib pemerintahan dengan permasalahan sebagai berikut (RPJMD Provinsi NTT; Bab 4. Hal 2):

1. Belum optimalnya mutu layanan pendidikan
2. Belum meratanya akses layanan pendidikan

Permasalahan yang tertuang dalam RPJMD merupakan isu strategis utama RPJP NTT tahun 2005-2025, yaitu:

1. Angka kemiskinan yang masih tinggi
2. Indeks Pembangunan Manusia NTT yang masih rendah
3. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan

Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan dalam RPJMD dan rencana strategis RPJP terlihat bahwa Provinsi NTT masih memiliki permasalahan yang cukup besar di sektor pendidikan. Permasalahan kualitas pendidikan dan akses layanan pendidikan dalam jangka panjang akan menjadi faktor penghambat dalam tercapainya kesejahteraan masyarakat. Berikut ini disajikan perkembangan indikator-indikator capaian Kesejahteraan Masyarakat di NTT tahun 2018-2020:

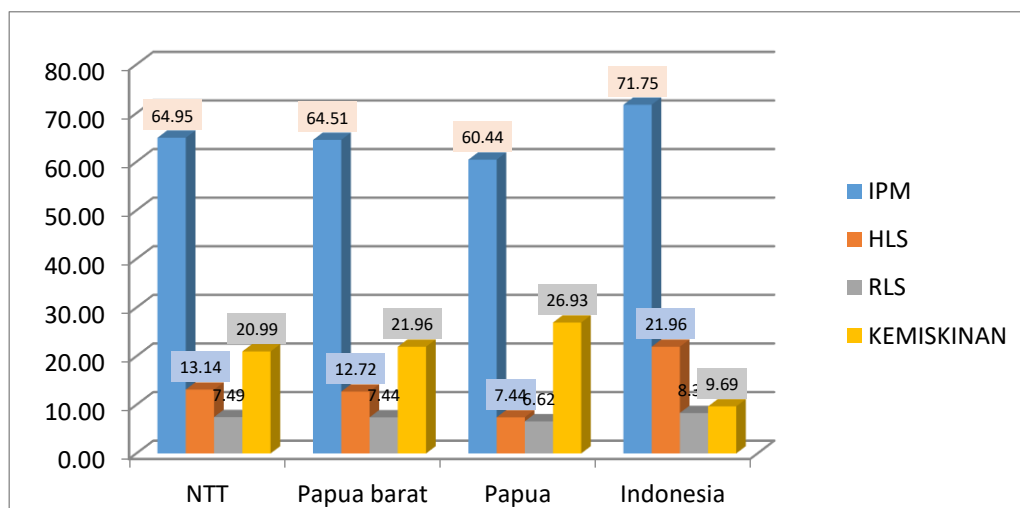
**Tabel 1. Capaian Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi NTT
Tahun 2018-2020**

Indikator Capaian Kesejahteraan						
Tahun	IPM	Rata-rata				
		Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Umur Harapan Hidup	Pengeluaran Rill	% Kemiskinan
2018	64.39	7.3	13.1	66.38	7,566,000	21.03
2019	65.23	7.55	13.15	66.85	7,769,000	20.62

2020	65.19	7.63	13.18	67.01	7,598,000	21.21
					7.644.333.3	
Rata-rata	64.94	7.49	13.14	66.75	3	20.95

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2021 (<https://ntt.bps.go.id>)

Berdasarkan data pada tabel 1 untuk indikator-indikator kesejahteraan masyarakat, terlihat bahwa rata-rata IPM tahun 2018-2020 adalah 64.94. IPM adalah sebuah ukuran yang menunjukkan kondisi disuatu wilayah bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. terlihat bahwa NTT berada pada kateogori *Sedang* dengan nilai >60. Rata-rata lama sekolah selama 3 tahun adalah 7.49, yang berarti penduduk NTT berusia di atas 25 tahun telah menikmati sekolah selama 7.49 tahun atau rata-rata mencapai kelas VII. Harapan lama sekolah berada pada 13.14 yang berarti anak NTT berusia 7 tahun memiliki harapan untuk mendapatkan pendidikan selama 13.14 tahun atau dapat mencapai minimal D1. Rata-rata pengeluaran riil menunjukkan tingkat ketercapaian hidup layak dalam suatu wilayah. Untuk NTT berada pada Rp.7.644.333.-, dengan rata-rata pertumbuhan kemiskinan 20.95%. Apabila dibandingkan dengan rata-rata Indonesia dan dua daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi lainnya, yaitu Papua dan Papua Barat maka kondisi NTT terlihat sebagai berikut:



**Gambar 2. Grafik Perbandingan Indikator Kesejahteraan
3 Daerah dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi di Indonesia**

Sumber: BPS, 2021 (<https://www.bps.go.id>)

Gambar 2 menunjukkan bahwa dalam analisis ini pertumbuhan tingkat kesejahteraan NTT menggunakan perbandingan, yaitu pertumbuhan kesejahteraan daerah lain yang masih berada dalam kategori kemiskinan tinggi. Perbandingan ini bertujuan untuk menggambarkan keberadaan NTT sebagai provinsi yang melaksanakan desentralisasi dengan kewajiban yang sama oleh pemerintahnya dalam mensejahterakan masyarakat.

Dalam rentang waktu penelitian, IPM NTT berada pada peringkat yang lebih baik dibandingkan Papua dan Papua Barat tetapi masih jauh berada di bawah rata-rata nasional

sebesar 71.75 . Harapan lama sekolah, Rata-rata lama sekolah juga masih berada di atas dua provinsi lainnya. Untuk indikator kemiskinan terlihat bahwa dalam tiga tahun terakhir rata-rata presentase penduduk miskin NTT 20.99% tertinggal dari rata-rata nasional sebesar 9.69%. berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur melalui ukuran IPM dan kemiskinan masih jauh berada di bawah rata-rata nasional tetapi cukup baik apabila dibandingkan dengan dua provinsi lainnya yang sama-sama berada dalam kategori daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Hasil analisis di atas kemudian akan dihubungkan dengan strategi kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD secara khusus mengenai kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam bidang pendidikan. Secara eksplisit pemerintah Provinsi NTT menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utamanya melalui kebijakan daerah di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut. Data pada tabel 1 menunjukkan pertumbuhan indikator kesejahteraan yang cenderung statis, tetapi dengan rata-rata yang cukup baik dengan pembandingan Provinsi Papua dan Papua Barat. Pertumbuhan yang cenderung statis menunjukkan bahwa selama tiga tahun pemerintah mungkin saja masih mempertahankan kebijakan fiskal yang sama melalui alokasi belanja daerahnya. Kebijakan alokasi akan mempengaruhi jumlah, jenis dan capaian kinerja untuk masing-masing program kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan.

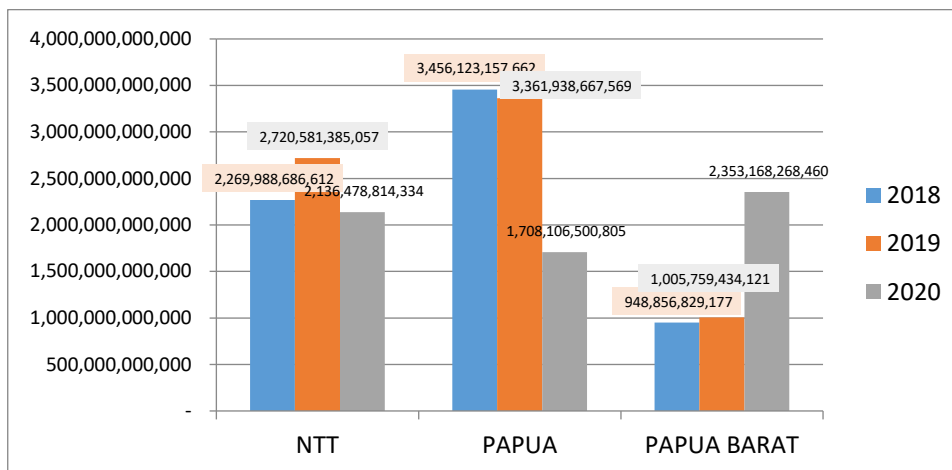
Berikut akan diberikan gambaran mengenai perubahan kebijakan fiskal daerah melalui alokasi belanja khusus sektor pendidikan di NTT.

**Tabel 2. Alokasi Belanja Daerah Bidang Pendidikan Provinsi NTT
Tahun 2018-2020**

Tahun	Belanja Pendidikan	Total Penerimaan Daerah	%
2018	2,269,988,686,612	4,781,089,962,593	47.48
2019	2,720,581,385,057	5,354,092,405,679	50.81
2020	2,136,478,814,334	6,210,887,924,686	34.40

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2021 (<https://ntt.bps.go.id>)

Data pada tabel 2 menunjukkan alokasi belanja pendidikan di NTT berfluktuasi dan cenderung searah dengan perubahan penerimaan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor kebijakan daerah berperan dalamnya. Belanja pendidikan tahun 2019 meningkat sebesar 0.17% dari tahun 2018 dengan perubahan penerimaan daerah meningkat sebesar 0.11%. sedangkan presentasi alokasi belanja pendidikan terhadap total belanja daerah meningkat mencapai 3.33% dibandingkan tahun 2018. Tahun 2020 adalah kondisi masa Pandemi Covid-19, sehingga pemerintah diwajibkan untuk melakukan penyesuaian anggaran untuk alokasi penanganan pandemi. Terlihat bahwa terjadi peningkatan total penerimaan daerah tetapi alokasi yang menurun untuk sektor pendidikan hanya mencapai 34.40%. Selanjutnya akan diberikan gambaran pertumbuhan belanja pendidikan di NTT dibandingkan Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai berikut:



**Gambar 3. Grafik Perbandingan Alokasi Belanja Pendidikan
3 Daerah dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi di Indonesia**

Sumber: BPS, 2021 (<https://www.bps.go.id>)

Berdasarkan gambar 3, terlihat dalam rentang waktu 2018-2020 alokasi belanja pendidikan di Provinsi Papua terus menurun sedangkan Papua Barat mengalami peningkatan yang cukup tajam, terutama untuk tahun 2020 melebihi alokasi NTT yang sudah cukup tinggi. Apabila dibandingkan dengan NTT, maka terlihat pola pergerakan belanja pendidikan di NTT meningkat pada rentang waktu tanpa intervensi eksternal dalam hal ini kebijakan pemerintah pusat untuk penanganan pademik pada tahun 2020, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal daerah di Provinsi NTT cukup statis apabila tanpa intervensi eksternal.

Tahapan analisis yang telah dilakukan di atas menunjukan kondisi riil NTT dalam mencapai tujuan pembangunannya dengan jalan mengatasi permasalahan-permasalahan utama yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023. Isu sentral di NTT adalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di lihat dari pertumbuhan kemiskinan dan IPM. Secara konseptual melalui perencanaan jangka menengah telah diprioritaskan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Salah satu strategi yang dipakai adalah peningkatan kualitas pendidikan di NTT melalui intervensi belanja pendidikan. Hasil analisis menunjukan bahwa dalam rentang waktu tiga tahun pertumbuhan kesejahteraan masyarakat cenderung statis atau tidak mengalami perubahan berarti yang diikuti dengan pertumbuhan belanja pendidikan pada pola pergerakan yang sama apabila tidak ada intervensi dari pemerintah pusat.

Perubahan searah ini menunjukan bahwa pemerintah daerah Provinsi NTT dalam rentang waktu 2018-2020 belum melakukan perubahan signifikan terhadap kebijakan fiskal daerah yang berhubungan dengan pendidikan. Program-program bidang pendidikan belum menyentuh permasalahan sesungguhnya, diperkuat dengan alokasi belanja pendidikan yang sudah cukup besar dari total penerimaan daerah tapi memiliki kontribusi yang rendah terhadap perbaikan kualitas sumber daya manusia ([1], [2], [20]).

Hasil analisis dengan menggunakan daerah pembanding menunjukan bahwa NTT masih cukup baik dalam hal tingkat kesejahteraannya. sedangkan pada alokasi belanja pendidikan NTT mengalami fluktuasi dengan perubahan signifikan pada tahun 2020. Papua

terus mengalami penurunan terhadap alokasi belanja pendidikan yang berbanding terbalik dengan Papua Barat yang terus meningkatkan alokasinya. Penurunan dan peningkatan alokasi di daerah pembandingan apabila dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, maka akan ditemukan fenomena menarik, yaitu baik daerah yang mengalami peningkatan dan penurunan alokasi tidak berdampak signifikan terhadap perubahan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

KESIMPULAN

Provinsi NTT telah menetapkan prioritas pembangunannya yang tertuang dalam RPJMD 2018-2020 sejalan dengan RPJP 2005-2025, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui intervensi kebijakan fiskal daerah yang dapat mengurangi angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui kebijakan alokasi anggaran pendidikan untuk program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2018-2020, indikator-indikator kesejahteraan masyarakat belum mengalami perubahan berarti. Kemiskinan dan IPM berfluktuasi sangat kecil meskipun terjadi peningkatan alokasi belanja pendidikan. Penelitian ini juga melakukan analisis perbandingan dengan dua provinsi lain. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa NTT masih cukup baik dalam hal pertumbuhan kesejahteraan dibandingkan Papua dan Papua Barat.

Kondisi di atas mengisyaratkan beberapa hal yang sejalan dengan teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, yaitu: daerah seperti Provinsi NTT mengalami kondisi pertumbuhan statis pada indikator kesejahteraan masyarakat sejalan dengan alokasi belanja pendidikan tetapi dengan presentasi alokasi yang besar menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan searah dengan alokasi belanja pendidikan, namun dalam implementasi kebijakan daerah, terlihat lemahnya pengendalian belanja pendidikan untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan. Alokasi yang besar tidak menjamin pencapaian tujuan daerah apabila tidak disertai kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengukur tingkat keberhasilan program dan kegiatan. Sedangkan untuk daerah yang mengalami pertumbuhan belanja positif atau negatif seperti Papua dan Papua Barat dengan pertumbuhan kesejahteraan statis, menunjukkan lemahnya sistem penilaian *value for money* untuk bidang pendidikan. Pemerintah cenderung tidak efisien dalam memanfaatkan belanja fungsi pendidikan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diharapkan kepada pemerintah Daerah agar dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan fiskal daerah dalam bidang pendidikan untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan kesejahteraan masyarakatnya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] A. M. Christia and B. Ispriyarso, "DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA," *Law Reform*, vol. 15, no. 1, p. 149, 2019, doi: 10.14710/lr.v15i1.23360.
- [2] M. W. N. Manafe, Z. Ena, and S. S. Adu, "FISCAL STRESS: Studi Kasus Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Wahana*, vol. 21, no. 2, pp. 125–135, 2019, doi: 10.35591/whn.v21i2.152.
- [3] H. C. Fanggidae and M. W. N. Manafe, "Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian Kebijakan Pembangunan Pada Pemerintah Daerah," *EkoPem*, vol. 4, no. 2, pp. 45–52, 2019.
- [4] D. A. N. Pertanian and H. M. Ala, "(Studi Kasus Pada Kabupaten / Kota Propinsi NTT)," vol. 18, no. 2, pp. 163–174, 2015.
- [5] S. Ali, F. Rabbi, U. Hayat, and N. Ali, "The composition of public expenditures and economic growth: Evidence from Pakistan," *Int. J. Soc. Econ.*, vol. 40, no. 11, pp. 1010–1022, 2013, doi: 10.1108/IJSE-05-2012-0081.
- [6] M. I. J. Attari and A. Y. Javed, "Inflation, Economic Growth and Government Expenditure of Pakistan: 1980-2010," *Procedia Econ. Financ.*, vol. 5, no. 13, pp. 58–67, 2013, doi: 10.1016/s2212-5671(13)00010-5.
- [7] I. Hanif, "Fiscal Autonomy and Economic Growth Nexus: Empirical Evidence from Pakistan," *Pakistan J. Soc. Sci. (PJSS)*, vol. 34, no. 2, pp. 767–780, 2014.
- [8] T. M. Al-Fawwaz, "The Impact of Government Expenditures on Economic Growth in Jordan (1980-2013)," *Int. Bus. Res.*, vol. 9, no. 1, p. 99, 2015, doi: 10.5539/ibr.v9n1p99.
- [9] O. M. Segun and A. O. A., "Measuring the Impact of Public Expenditure on Economic Growth in Nigeria," *J. Soc. Sci. Stud.*, vol. 2, no. 2, p. 46, 2015, doi: 10.5296/jsss.v2i2.5626.
- [10] E. L. Kimaro, C. C. Keong, and L. L. Sea, "Government Expenditure, Efficiency and Economic Growth: A Panel Analysis of Sub Saharan African Low Income Countries," *African J. Econ. Rev.*, vol. 5, no. 2, pp. 34–54, 2017.
- [11] R. Maurya and B. P. Singh, "Nexus of Economic Growth and Public Expenditure in India," *Indian J. Econ. Dev.*, vol. 13, no. 1, p. 165, 2017, doi: 10.5958/2322-0430.2017.00022.1.
- [12] S. Makreshanska-Mladenovska and G. Petrevski, "Fiscal decentralisation and government size: Evidence from a panel of european countries," *Hacienda Publica Esp.*, vol. 229, no. 2, pp. 33–58, 2019, doi: 10.7866/hpe-rpe.19.2.2.
- [13] G. Dudzevičiūtė, A. Šimelytė, and A. Liučvaitienė, "Government expenditure and economic growth in the European Union countries," *Int. J. Soc. Econ.*, vol. 45, no. 2, pp. 372–386, 2018, doi: 10.1108/IJSE-12-2016-0365.
- [14] I. Hanif, S. Wallace, and P. Gago-de-Santos, "Economic Growth by Means of Fiscal Decentralization: An Empirical Study for Federal Developing Countries," *SAGE Open*, vol. 10, no. 4, 2020, doi: 10.1177/2158244020968088.
- [15] Kementrian PPN/Bappenas, "Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas," *Anal. Wil. dengan Kemiskinan. Tinggi*, p. 10, 2018, [Online]. Available: https://www.bappenas.go.id/files/6915/6082/6584/Analisis_Wilayah_dengan_Kemiskinan_Tinggi_-_BAPPENAS.pdf.

-
- [16] P. A. Samuelson, "The Pure Theory of Public Expenditure," *Rev. Econ. Stat.*, vol. 36, no. 4, p. 387, 1954, doi: 10.2307/1925895.
- [17] T. P. D. Undang-Undang No 32 Tahun 2004, "Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah," *Dpr*, p. 249, 2004, [Online]. Available: <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>.
- [18] konsep tual Pemerintah, "DHendianto-BiroHukum BPK-RI/5/26/2008 1," no. 1, pp. 1–40, 2003.
- [19] S. Lubis, M. Hutabarat, and M. R. Nasution, "Undang Undang Dasar 1945," vol. 4, no. 1, pp. 1–12, 2019, doi: 10.31227/osf.io/498dh.
- [20] H. K. Fanggidae and M. W. N. Manafe, "Evaluasi anggaran belanja sebagai alat pengendalian kebijakan pembangunan pada Pemerintah Daerah," *Ekopem J. Ekon. ...*, vol. 4, no. 2, pp. 45–52, 2019, [Online]. Available: <http://jurnal.unimor.ac.id/JEP/article/view/162>.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN